

RENCANA KERJA (RENJA)

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2026





SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan dengan baik, mencapai sasaran, serta berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi setelah RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6870);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 115);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dalam periode 1 (satu) Tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dengan mengacu dari RKPD Tahun 2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
- (2) Kedudukan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam penyusunan RKA.
- (3) Sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Penutup.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:
 1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - a. RSUD Doris Sylvanus;
 - b. RSJ Kalawa Atei; dan
 - c. RSUD Hanau.
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
25. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
27. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
29. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
30. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
32. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah;
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
34. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
35. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan

36. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:

- a. Biro Administrasi Pimpinan;
- b. Biro Kesejahteraan Rakyat;
- c. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Perekonomian;
- f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
- g. Biro Administrasi Pembangunan;
- h. Biro Organisasi; dan
- i. Biro Umum.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Juli 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 20 Juli 2025

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

LEONARD S. AMPUNG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, diamanatkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun, memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, dan juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Kiranya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini dapat menjadi data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah dalam penyediaan barang/jasa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Palangka Raya, 2025

**KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA,**



SUHARNO, S.T., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196808061989031013

U/RENJA 2026 BIRO PBJ

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan	
Capaian Renstra PD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas	
dan Fungsi Perangkat Daerah	9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	13
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	13
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	
Perangkat Daerah	14
3.3 Program dan Kegiatan.....	14
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	
4.1 Program Kegiatan	16
BAB V PENUTUP	19
DAFTAR LAMPIRAN	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pengukuran Indikator Kinerja Biro PBJ Per 30 September 2025	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	8
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	12
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka perlu terus menerus dilakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Dalam kerangka itulah disusun Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2026, dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD 5 (lima) Tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggung jawaban Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Awal SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	13
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	13
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	14
3.3 Program dan Kegiatan	14
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program Kegiatan	16
BAB V PENUTUP	19
DAFTAR LAMPIRAN	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pengukuran Indikator Kinerja Biro PBJ Per 30 September 2025	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	8
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	12
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka perlu terus menerus dilakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Dalam kerangka itulah disusun Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2026, dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD 5 (lima) Tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggung jawaban Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Awal SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun *stakeholders* dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (2010-2025);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 20 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Organisasi Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam Pembangunan Daerah.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan dan sarana pengendalian Program/Kegiatan Tahunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Ruang lingkup isi Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU

Bab ini memuat hasil evaluasi menyajikan informasi tentang Renja Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun lalu (2025) yang terdiri dari:

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu dan capaian Renstra-PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab III ini memuat:

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat cacatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap RENJA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
2. Pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan;
3. Hasil rencana program & kegiatan.

Evaluasi kinerja Tahun 2025 merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD yang dilaksanakan oleh masing-masing SOPD dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan RENJA SOPD Tahun 2025. Tujuan evaluasi kinerja RENJA SOPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 antara lain untuk mengidentifikasi capaian kinerja program dan kegiatan yang belum terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi entry point dalam Rencana Kerja (RENJA) SOPD Tahun 2026. Selain itu, evaluasi kinerja Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi dan keberlanjutan pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD dan RKPD Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam rangka mencapai Misi dan Visi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Biro PBJ pada Tahun 2025 melaksanakan 2 program, 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2025 telah melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut dengan besaran pagu anggaran Rp. 3.373.176.145.-. Capaian realisasi keuangan pada 30 September 2025 sebesar Rp. 1.864.043.304.- (55.20%).

Pengukuran kinerja Biro PBJ didasarkan pada sasaran strategis dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Pengukuran Indikator Kinerja Biro PBJ Per 30 September 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Tepat Waktu	100%	92.79%
	Ketersediaan Sistem Layanan Secara Elektronik (SPSE)	100%	74.79%

Berdasarkan hasil capaian Per 30 September 2025 sasaran pada tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) Capaian Pengadaan yang Tepat Waktu yang selesai dilaksanakan sampai dengan 31 September 2025 mencapai sebesar 92.79%, (2) Capaian Tersedianya Sistem Layanan Secara Elektronik yang selesai dilaksanakan sebesar 74.79%. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan Pencapaian RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa s/d 30 September 2025 seperti yang terdapat pada Tabel 2.2 pada LAMPIRAN.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membina, mengoordinasikan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBD/APBN/Hibah/Dana Luar Negeri di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk menganalisis kinerja pelayanan SOPD yang menjadi tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah digunakan beberapa indikator yang mengacu Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dengan sasaran target sesuai dengan RENSTRA atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Pencapaian kinerja indikator SOPD Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada tujuan dan sasaran target sesuai dengan RENSTRA yang berdasarkan atas hasil standar kebutuhan pelayanan. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada Tabel 2.2 pada LAMPIRAN.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan ditunjukkan dengan capaian pelaksanaan program dan output yang dihasilkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 ini tidak terlepas dari Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka

8/RENJA 2026 BIRO PBJ

beberapa tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak terlepas dari pelayanan terhadap Perangkat Daerah maupun masyarakat luas. Bidang urusan yang dilaksanakan yaitu urusan urusan pengadaan barang/jasa. Dalam rangka mewujudkan urusan pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, profesional, terbuka dan kredibel, dapat dilaporkan bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun

2025 berdasarkan data pada Aplikasi SIAP BAJASA jumlah paket yang terdaftar sebanyak 222 paket, dan proses pemilihan penyedia yang selesai dilaksanakan sebanyak 206 paket, dengan total nilai kontrak sebesar Rp.1.492.033.559.854,15,- atau sebesar 92.79%

Dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, tentunya terdapat beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi. Berikut disampaikan beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- 1) Pengumuman RUP oleh SOPD masih ada yang mengalami keterlambatan melewati tenggat jadwal yang ditetapkan sehingga berdampak pada realisasi penyerapan anggaran
- 2) Pejabat Pengadaan yang melaksanakan proses Pengadaan Langsung paket-paket pekerjaan di beberapa OPD bukan merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang berkedudukan di Biro PBJ Provinsi Kalteng;
- 3) Tersedianya layanan SPSE yang dapat mendorong peningkatan transparansi proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pelaksanaan 100% pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- 4) Penilaian kinerja penyedia belum dilaksanakan.

Dari hambatan/permasalahan yang dihadapi, upaya pemecahan/solusi guna mengantisipasi hambatan dan kendala diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan kepada SOPD terkait kewajiban dan tenggat waktu pengumuman RUP dan Melakukan koordinasi lebih awal antara perencana, PPK, dan pejabat pengadaan agar tidak terjadi keterlambatan input data;
- 2) Menetapkan secara formal bahwa seluruh Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus berasal dari unit kerja pengelola PBJ (Biro PBJ) sesuai ketentuan peraturan perundangan serta Menyusun dan menerapkan kebijakan teknis atau surat edaran Gubernur/Sekretaris Daerah yang mengatur bahwa pelaksanaan Pengadaan Langsung harus dilakukan oleh

- pejabat yang ditetapkan melalui Biro PBJ;
- 3) Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada seluruh OPD agar seluruh proses pengadaan dilakukan melalui SPSE, meningkatkan kapasitas server, jaringan, dan keamanan data untuk menjamin kelancaran dan keandalan layanan SPSE dan Mengembangkan dashboard monitoring real time untuk memantau progres pengadaan secara elektronik;
 - 4) Menyusun pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) penilaian kinerja penyedia barang/jasa sesuai dengan Peraturan LKPP yang berlaku dan Menetapkan kebijakan internal melalui keputusan Gubernur atau Sekretaris Daerah tentang mekanisme dan tanggung jawab pelaksanaan penilaian kinerja penyedia.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dan menjadi salah satu prioritas utama pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (MUSRENBANG-SOPD). Usulan ini sebagian telah diakomodir dan dianggarkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi fokus program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan kegiatan disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, yaitu :

1. Memenuhi kriteria yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*), peningkatan lapangan kerja (*pro job*), pertumbuhan (*pro growth*) dan mendukung pelestarian lingkungan (*pro environment*);
2. Program dan kegiatan terpilih harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat serta sesuai dengan TUPOKSI Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan tengah;

3. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang faktual dihadapi;
Program dan kegiatan terpilih merupakan program dan kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
4. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untukantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional, dan
5. Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (MUSRENBANG-SOPD) tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku SOPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SOPD Kabupaten/Kota. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Adapun Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 disampaikan dalam Tabel 2.4 pada LAMPIRAN.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Reformasi Birokrasi adalah salah satu program prioritas Presiden yang diturunkan dari Visi Astacita, Reformasi Birokrasi menjadi prioritas karena tanpa birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani, maka sulit membayangkan program-program pembangunan yang strategis bisa memiliki dampak besar bagi masyarakat.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. 8 (delapan) prioritas nasional dalam RKP 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

4.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi melalui Misi Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan yaitu :

Visi: “ Kalteng Berkah Kalteng Maju”

Mengangkat Harkat Martabat Dayak Khususnya, Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Mangatang Utus), Dengan Spirit Kearifan Lokal dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat Untuk Menyambut Indonesia Emas 2045.

Misi: “ Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah”

1. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal,
2. Peningkatan Pendidikan Untuk Sumber Daya Manusia Yang Beretika Melalui Pendidikan Inklusif Sesuai Dengan Kaidah Belom Bahadat,
3. Pembangunan Infrastruktur Yang Merata dan Berkeadilan Untuk Meningkatkan Konektivitas dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Lingkungan,

4. Menghadirkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Sebagai Keadilan Sosial,
5. Pemberdayaan Kearifan Lokal Dalam Kebijakan dan Program Pemerintah Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

Dalam rangka mewujudkan Visi melalui Misi Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Tengah diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang perlu dirumuskan dalam langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, rasional dan dapat dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi diharapkan dapat memberikan arahan bagi pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan misi dimaksud. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026-2030 dibuat berdasarkan rumusan misi sesuai dengan dokumen RPJMD Kalimantan Tengah Periode 2026-2030.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tujuannya adalah **Terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa yang Berkualitas**. Adapun sasarannya adalah **Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa**. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut tentunya pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif,

akuntabel dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sebagai parameter keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, indikator kinerja yang ditetapkan adalah:

- (a) Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan;
- (b) Indeks Kepuasan Masyarakat.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Untuk mendukung tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 mencakup 2 Program yang terdiri dari 9 kegiatan dan 28 sub kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 7) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- 8) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

- 10) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 11) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor;
- 12) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 13) Fasilitas Kunjungan Tamu;
- 14) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- 15) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 16) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 17) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 18) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- 19) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

2. PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

7. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Kegiatan:

- 20) Pengelolaan Strategi Pengadaan barang dan Jasa;
- 21) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 22) Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa;

8. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Sub Kegiatan:

- 23) Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- 24) Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- 25) Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa;

9. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Kegiatan:

- 26) Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 27) Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- 28) Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

Rumusan Rencana Kerja (RENJA) program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 untuk sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah secara detail dapat dilihat pada Tabel 4.2 pada bagian LAMPIRAN.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 sebagai langkah pengambilan kebijakan dalam menangani persoalan dalam bentuk rumusan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas, fungsi dan tanggung jawab. Dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, telah dirumuskan program dan kegiatan yang menggambarkan keadaan yang ingin dicapai sampai dengan akhir masa Renja, serta upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan program dan kegiatan tersebut.

Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 menjadi dasar untuk penetapan KUA-PPAS, RKA dan DPA-SOPD Tahun Anggaran 2026 sebagai wujud pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SOPD Tahun 2026 ini juga sebagai acuan pertanggungjawaban Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan DPA-SOPD Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2021 s/d 2025)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) (2025)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2025)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH											
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro PBJ (Dokumen)	6	Dokumen	3	1	Dokumen	1	100%	1	5	83%
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6	Dokumen	3	1	Dokumen	1	100%	1	5	83%
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	6	Dokumen	3	1	Dokumen	1	100%	1	5	83%
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	6	Dokumen	3	1	Dokumen	1	100%	1	5	83%
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	6	Dokumen	3	1	Dokumen	1	100%	1	5	83%
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	6	Dokumen	3	1	Dokumen	1	100%	1	5	83%
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Pelaksana Administrasi (Orang)	36	Orang	18	6	Orang	6	100%	6	30	83%
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD (Dokumen)	6	Dokumen	3	1	Dokumen	1	100%	1	5	83%
4.01.01.1.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Triwulanan/Semesteran Biro PBJ	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran/Triwulanan/Semesteran Biro PBJ (Dokumen)	6	Dokumen	3	1	Dokumen	1	100%	1	5	83%
4.01.01.1.02.0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Ralisasi Anggaran (Dokumen)	6	Dokumen	3	1	Dokumen	1	100%	1	5	83%
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
4.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah JF PPBJ yang dilakukan penilaian angka kredit (Orang)	106	Orang	52	17	Orang	17	100%	18	87	82%
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan TUSI yang mengikuti DIKLAT (Orang/Tahun)	36	Orang/ Tahun	18	6	Orang	6	100%	6	30	83%
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Per-UU (Orang)	600	Orang	300	100	Orang	100	100%	100	500	83%

4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	12	Paket	6	2	Paket	2	100%	2	10	83%
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	18	Paket	9	3	Paket	3	100%	3	15	83%
4.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Konsumsi Fasilitas Kunjungan Tamu (Bulan)	72	Bulan	36	12	Bulan	12	100%	12	60	83%
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)	72	Laporan	36	12	Laporan	12	100%	12	60	83%
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bulan)	72	Bulan	36	12	Bulan	12	100%	12	60	83%
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi berupa Jaringan Internet (Bulan)	72	Bulan	36	12	Bulan	12	100%	12	60	83%
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	18	Jenis	9	3	Jenis	3	100%	3	15	83%
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Non ASN (Orang)	23	Orang	14	3	Orang	3	100%	3	20	87%
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Jenis)	13	Jenis	4	1	Jenis	1	100%	2	7	54%
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN											
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa											
4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Strategi PBJ (Laporan)	6	Laporan	3	1	Laporan	1	100%	1	5	83%
4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan PBJ (Laporan)	6	Laporan	3	1	Laporan	1	100%	1	5	83%
4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi PBJ (e-Katalog, dll) (Laporan)	6	Laporan	3	1	Laporan	1	100%	1	5	83%
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik											
4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	6	Laporan	3	1	Laporan	1	100%	1	5	83%
4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi PBJ (Laporan)	6	Laporan	3	1	Laporan	1	100%	1	5	83%
4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Informasi PBJ (Laporan)	6	Laporan	3	1	Laporan	1	100%	1	5	83%
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa											
4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SDM PBJ (Laporan)	6	Laporan	3	1	Laporan	1	100%	1	5	83%
4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan PBJ (Laporan)	6	Laporan	3	1	Laporan	1	100%	1	5	83%
4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimtek PBJ	6	Laporan	3	1	Laporan	1	100%	1	5	83%

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Per 30 September 2025

No	Indikator	SPM/standar minimal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2) (2024)	Tahun (thn n-1) (2025)	Tahun (thn n) (2026)	Tahun (thn n+1) (2027)	Tahun (thn n-2) (2024)	Tahun (thn n-1) (2025)	Tahun (thn n) (2026)	Tahun (thn n+1) (2027)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan		Proses Pengadaan selesai tepat waktu berdasarkan jumlah paket dan nilai paket pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%	100%	100%	92.79%	-	-	
2	Ketersediaan sistem layanan secara elektronik (SPSE)		Layanan SPSE dapat diakses sepanjang waktu dilihat dari nilai uptime layanan	100%	100%	100%	100%	99.45%	74.79%	-	-	
3	Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan			-	-	-	-	-	-	70.00	75.00	Satuan Indek
4	Indeks Kepuasan Masyarakat			-	-	-	-	-	-	84.00	85.00	

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Perangkat Daerah : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALIMANTAN TENGAH

Rancangan RKPD						Lembar dari					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4,489,804,780	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4,489,804,780	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				1,789,804,780	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				1,789,804,780	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro PBJ (Dokumen)	1 Dokumen	1,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro PBJ (Dokumen)	1 Dokumen	1,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				121,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				121,000,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah ASN Pelaksana Administrasi (Orang)	6 Orang	120,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah ASN Pelaksana Administrasi (Orang)	6 Orang	120,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah ASN Pelaksana Administrasi (Orang)	6 Orang	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro PBJ	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran/Triwulanan/Semesteran Biro PBJ (Dokumen)	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran/Triwulanan/Semesteran Biro PBJ (Dokumen)	1 Dokumen	-	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				450,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				450,000,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah JF PPBJ yang dilakukan penilaian angka kredit (Orang)	18 Orang	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah JF PPBJ yang dilakukan penilaian angka kredit (Orang)	18 Orang	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Pegawai berdasarkan TUSI yang mengikuti DIKLAT (Orang/Tahun)	6 Orang	350,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Pegawai berdasarkan TUSI yang mengikuti DIKLAT (Orang/Tahun)	6 Orang	350,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Per-UU (Orang)	100 Orang	100,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Per-UU (Orang)	100 Orang	100,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,007,804,780	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,007,804,780	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2 Paket	200,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2 Paket	200,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	3 Paket	100,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	3 Paket	100,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyediaan Konsumsi Fasilitasi Kunjungan Tamu (Bulan)	12 Bulan	15,500,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyediaan Konsumsi Fasilitasi Kunjungan Tamu (Bulan)	12 Bulan	15,500,000	
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)	12 Laporan	692,304,780	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)	12 Laporan	692,304,780	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bulan)	12 Bulan	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bulan)	12 Bulan	5,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi berupa Jaringan Internet (Bulan)	12 Bulan	5,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi berupa Jaringan Internet (Bulan)	12 Bulan	5,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	3 Jenis	20,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	3 Jenis	20,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Tenaga Administrasi Non ASN (Orang)	3 Orang	70,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Tenaga Administrasi Non ASN (Orang)	3 Orang	70,000,000	

Pemerintahan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105,000,000	2 Jenis	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Jenis)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Jenis)	105,000,000
Pemerintahan Peralatan dan Mesin lainnya	105,000,000					105,000,000
PROGRAM KEBUJUKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2,700,000,000					2,700,000,000
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,000,000,000					1,000,000,000
Pengelolaan Strategi Pengadaan barang dan Jasa	350,000,000	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Strategi PBJ (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Strategi PBJ (Laporan)	350,000,000
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	250,000,000	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan PBJ (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan PBJ (Laporan)	250,000,000
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	400,000,000	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi PBJ (e-Katalog, dll) (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi PBJ (e-Katalog, dll) (Laporan)	400,000,000
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1,000,000,000					1,000,000,000
Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	400,000,000	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	400,000,000
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	400,000,000	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi PBJ (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi PBJ (Laporan)	400,000,000
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	200,000,000	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Informasi PBJ (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Informasi PBJ (Laporan)	200,000,000
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	700,000,000					700,000,000
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	200,000,000	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SDM PBJ (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SDM PBJ (Laporan)	200,000,000
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	250,000,000	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan PBJ (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan PBJ (Laporan)	250,000,000
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	250,000,000	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis PBJ	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis PBJ	250,000,000
	4,489,804,780					4,489,804,780

2025

Palangka Raya,
KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA,

SUHARMO, S.T., M.Si
Nip. 196808081989310113



Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Perangkat Daerah : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
4	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro PBJ (Dokumen)	1 Dokumen	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah ASN Pelaksana Administrasi (Orang)	6 Orang	
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	
4	01	01	1.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran/Triwulanan/Semesteran Biro PBJ (Dokumen)	1 Dokumen	
4	01	01	1.02		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Ralisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah JF PPBJ yang dilakukan penilaian angka kredit (Orang)	18 Orang	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Pegawai berdasarkan TUSI yang mengikuti DIKLAT (Orang/Tahun)	6 Orang	
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Per-UU (Orang)	100 Orang	

4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	2 Paket	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	3 Paket	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyediaan Konsumsi Fasilitas Kunjungan Tamu (Bulan)	12 Bulan	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)	12 Laporan	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bulan)	12 Bulan	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi berupa Jaringan Internet (Bulan)	12 Bulan	
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	3 Jenis	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Tenaga Administrasi Non ASN (Orang)	3 Orang	
4	01	01	1.09		Pemeriharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4	01	01	1.09	06	Pemeriharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Jenis)	2 Jenis	
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Strategi PBJ (Laporan)	1 Laporan	
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan PBJ (Laporan)	1 Laporan	
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi PBJ (e-Katalog, dll) (Laporan)	1 Laporan	
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	1 Laporan	
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi PBJ (Laporan)	1 Laporan	

4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Informasi PBJ (Laporan)	1 Laporan	
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SDM PBJ (Laporan)	1 Laporan	
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan PBJ (Laporan)	1 Laporan	
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimtek PBJ	1 Laporan	

Tabel 3.3.
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2025) dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Provinsi Kalimantan Tengah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	lengkap dari				Prakiraan Maju Rencana Tahun ... (2027)		
							Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) (2026)				Catatan Penting		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4,489,804,780				4,550,165,482
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				1,789,804,780				1,886,789,181.80
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6,000,000				6,000,000
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro PBJ (Dokumen)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1,000,000	PAD		1 Dokumen	1,000,000
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1,000,000	PAD		1 Dokumen	1,000,000
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1,000,000	PAD		1 Dokumen	1,000,000
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1,000,000	PAD		1 Dokumen	1,000,000
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1,000,000	PAD		1 Dokumen	1,000,000
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1,000,000	PAD		1 Dokumen	1,000,000
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				121,000,000				161,000,000
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Pelaksana Administrasi (Orang)	Provinsi Kalimantan Tengah	6 Orang	120,000,000	PAD		6 Orang	160,000,000
4	01	01	1.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD (Dokumen)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1,000,000	PAD		1 Dokumen	1,000,000
4	01	01	1.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran/Triwulanan/Semesteran Biro PBJ (Dokumen)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	-	PAD		2 Dokumen	-
4	01	01	1.02		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Ralisasi Anggaran (Dokumen)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Dokumen	-	PAD		3 Dokumen	-
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Provinsi Kalimantan Tengah		450,000,000				500,000,000
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah JF PPBJ yang dilakukan penilaian angka kredit (Orang)	Provinsi Kalimantan Tengah	18 Orang	-	PAD		18 Orang	-
4	01	01	1.05	06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan TUSI yang mengikuti DIKLAT (Orang/Tahun)	Provinsi Kalimantan Tengah	6 Orang	350,000,000	PAD		6 Orang	400,000,000
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Per-UU (Orang)	Provinsi Kalimantan Tengah	100 Orang	100,000,000	PAD		100 Orang	100,000,000

4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,007,804,780				1,014,789,181.80
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	Provinsi Kalimantan Tengah	2 Paket	200,000,000	PAD	2 Paket	229,259,780
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	Provinsi Kalimantan Tengah	3 Paket	100,000,000	PAD	3 Paket	100,000,000
4	01	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Konsumsi Fasilitas Kunjungan Tamu (Bulan)	Provinsi Kalimantan Tengah	12 Bulan	15,500,000	PAD	12 Bulan	15,500,000
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	12 Laporan	692,304,780	PAD	12 Laporan	670,029,401.80
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,000,000			100,000,000
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bulan)	Provinsi Kalimantan Tengah	12 Bulan	5,000,000	PAD	12 Bulan	5,000,000
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi berupa Jaringan Internet (Bulan)	Provinsi Kalimantan Tengah	12 Bulan	5,000,000	PAD	12 Bulan	5,000,000
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	Provinsi Kalimantan Tengah	3 Jenis	20,000,000	PAD	3 Jenis	20,000,000
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Non ASN (Orang)	Provinsi Kalimantan Tengah	3 Orang	70,000,000	PAD	3 Orang	70,000,000
4	01	01	1.09		Pemeriharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				105,000,000			105,000,000
4	01	01	1.09	06	Pemeriharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Jenis)	Provinsi Kalimantan Tengah	2 Jenis	105,000,000	PAD	2 Jenis	105,000,000
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				2,700,000,000			2,663,376,301
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1,000,000,000			1,000,000,000
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Strategi PBJ (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	350,000,000	PAD	1 Laporan	350,000,000
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan PBJ (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	250,000,000	PAD	1 Laporan	250,000,000
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi PBJ (e-Katalog, dll) (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	400,000,000	PAD	1 Laporan	400,000,000
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1,000,000,000			939,999,999.51
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	400,000,000	PAD	1 Laporan	354,000,000
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi PBJ (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	400,000,000	PAD	1 Laporan	385,999,999.51
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Informasi PBJ (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	200,000,000	PAD	1 Laporan	200,000,000
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				700,000,000			723,376,301
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SDM PBJ (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	200,000,000	PAD	1 Laporan	223,376,301
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan PBJ (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	250,000,000	PAD	1 Laporan	250,000,000
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimtek PBJ	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	250,000,000	PAD	1 Laporan	250,000,000
					JUMLAH			4,489,804,780				4,550,165,482.31

4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Per-UU (Orang)	Provinsi Kalimantan Tengah	100 Orang	100,000,000	PAD		100 Orang	100,000,000
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,007,804,780				1,014,789,182
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	Provinsi Kalimantan Tengah	2 Paket	200,000,000	PAD		2 Paket	229,259,780
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	Provinsi Kalimantan Tengah	3 Paket	100,000,000	PAD		3 Paket	100,000,000
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Konsumsi Fasilitasi Kunjungan Tamu (Bulan)	Provinsi Kalimantan Tengah	12 Bulan	15,500,000	PAD		12 Bulan	15,500,000
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	12 Laporan	692,304,780	PAD		12 Laporan	670,029,402
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,000,000				100,000,000
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bulan)	Provinsi Kalimantan Tengah	12 Bulan	5,000,000	PAD		12 Bulan	5,000,000
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi berupa Jaringan Internet (Bulan)	Provinsi Kalimantan Tengah	12 Bulan	5,000,000	PAD		12 Bulan	5,000,000
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	Provinsi Kalimantan Tengah	3 Jenis	20,000,000	PAD		3 Jenis	20,000,000
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Non ASN (Orang)	Provinsi Kalimantan Tengah	3 Orang	70,000,000	PAD		3 Orang	70,000,000
4	01	01	1.09		Pemeriharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				105,000,000				60,000,000
4	01	01	1.09	06	Pemeriharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Jenis)	Provinsi Kalimantan Tengah	2 Jenis	105,000,000	PAD		2 Jenis	60,000,000
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				2,700,000,000				2,663,376,301
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1,000,000,000				1,000,000,000
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Strategi PBJ (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	350,000,000	PAD		1 Laporan	350,000,000
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan PBJ (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	250,000,000	PAD		1 Laporan	250,000,000
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi PBJ (e-Katalog, dll) (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	400,000,000	PAD		1 Laporan	400,000,000

4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1,000,000,000				940,000,000
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	400,000,000	PAD		1 Laporan	354,000,000
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi PBJ (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	400,000,000	PAD		1 Laporan	386,000,000
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Informasi PBJ (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	200,000,000	PAD		1 Laporan	200,000,000
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				700,000,000				723,376,301
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SDM PBJ (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	200,000,000	PAD		1 Laporan	223,376,301
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan PBJ (Laporan)	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	250,000,000	PAD		1 Laporan	250,000,000
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimtek PBJ	Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	250,000,000	PAD		1 Laporan	250,000,000
									4,489,804,780				4,505,165,482



PALANGKA RAYA, 2025

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA,

SUHARNO, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680806198931013